

ISSN: 2087-7900

● JOURNAL
POLITICA

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 8 NO.1, MEI 2017

Penanggung Jawab:

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. (Hubungan Internasional)

Dewan Redaksi:

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. (Hubungan Internasional)

Riris Katharina, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara)

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. (Hubungan Internasional)

Drs. Ahmad Budiman, M. Pd. (Komunikasi Politik)

Pelaksana Redaksi:

Lisbet, S.IP., M.Si.

Rizki Roza, S.IP, M.Si.

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Dewi Sendhikasari D., S.IP., M.P.A.

Staff Redaksi:

Sri Rejeki, S.E., Yeti Ifana, S.E., Supriyanto

Mitra Bestari:

DR. Lili Romli, M.Si. (Perkembangan Politik Nasional, LIPI)

Dinna wisnu, Ph.d (Hubungan Internasional, UNIKA Atma Jaya)

Dr. Riant Nugroho (Kebijakan Publik, UI)

Dr. phil. Yandry Kurniawan Kasim (Hubungan Internasional, UI)

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2

Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270

Telp : 021-5755987 Fax : 021-5756067

Email : jurnal.politica@dpr.go.id

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Naskah diketik sesuai dengan format yang tercantum pada halaman belakang
(Lihat pedoman penulisan)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii-iv
Abstrak.....	v-x
Mengapa Kelompok “Tidak Setuju” Diperlakukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015? <i>oleh: Ikhsan Darmawan</i>	1-19
Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan: Studi Kasus Bank Sampah <i>Gardu Action</i> , Mancingan XI, Parangtritis, Bantul <i>oleh: Anggalih Bayu Muh. Kamim</i>	20-37
Gastrodiplomasi – Upaya Memperkuat Diplomasi Indonesia <i>oleh: Adirini Pujayanti</i>	38-56
Peran <i>Asian Parliamentary Assembly</i> dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel <i>oleh: Simela Victor Muhamad</i>	57-76
The Implementation of Socialist Republic of Vietnam’s Defense Policy in Encountering People’s Republic of China’s Strategic Position in the South China Sea Dispute <i>oleh: Anak Agung Banyu Perwita and Rahma Yustika Dewi</i>	77-94
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Politica hadir diterbitkan pertama di Tahun 2017, melalui Volume 8 Nomor 1, Mei 2017. *Jurnal Politica* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan atau ide-ide yang bisa digunakan sebagai sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Politica* merupakan tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Edisi kali ini menyajikan 5 (lima) tulisan yang mengkaji beberapa persoalan yang dibahas secara mendalam oleh beberapa penulis menyangkut isu nasional dan isu internasional, yaitu: Mengapa Kelompok “tidak setuju” Diperlakukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015?; Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan: Studi Kasus Bank Sampah *Gardu Action*, Mancingan XI, Parangtritis, Bantul; Gastrodiplomasi – Upaya Memperkuat Diplomasi Indonesia; Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel; dan *The Implementation of Socialist Republic of Vietnam’s Defense Policy in Encountering People’s Republic of China’s Strategic Position in the South China Sea Dispute*.

Tulisan pertama di *Jurnal Politica* berjudul “Mengapa Kelompok “tidak setuju” Diperlakukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015?” ditulis oleh Ikhsan Darmawan. Pilkada calon tunggal tahun 2015 terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Di tiap daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, terdapat kelompok “tidak setuju” yang awalnya tidak setuju dengan putusan MK tentang Pilkada calon tunggal lalu mereka menyuarakan kesetaraan hak dan pengakuan untuk pilihan “tidak setuju”. Tetapi, pada kenyataannya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan calon atau kelompok “setuju”. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan fenomena tidak diberi ruang yang sama untuk kelompok “tidak setuju” dalam Pilkada calon tunggal disebabkan oleh aturan yang tidak menempatkan kelompok “tidak setuju” sebagai pihak yang sama dan setara dengan calon kepala daerah.

Tulisan kedua ditulis oleh Anggalih Bayu Muh. Kamim dengan judul “Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan: Studi Kasus Bank Sampah *Gardu Action*, Mancingan XI, Parangtritis, Bantul.” Tulisan yang merupakan hasil penelitian penulis menyebutkan sistem politik intrakomunitas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Mancingan XI, Parangtritis, Bantul dengan mendorong terbentuknya Bank Sampah. Penulis berkesimpulan Bank Sampah sebagai elemen sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI memiliki peranan penting dalam melakukan manajemen konflik, mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi di aras lokal.

Tulisan dengan judul “Gastrodiplomasi–Upaya Memperkuat Diplomasi Indonesia,” merupakan tulisan ketiga dalam *Jurnal Politica* yang ditulis oleh Adirini Pujayanti. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan penulis di Yogyakarta, Solo dan Semarang. Penulis menilai gastrodiplomasi merupakan diplomasi budaya yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan *brand awareness* bangsa. Gastrodiplomasi adalah instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan interaksi dan kerjasama internasional. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui gastrodiplomasi Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Tulisan keempat berjudul “Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel” yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad. Solusi damai atas konflik Palestina-Israel yang belum berhasil dicapai perlu menjadi perhatian internasional, termasuk parlemen. *Asian Parliamentary Assembly* (APA), sebagai organisasi antar-parlemen negara-negara Asia, perlu mengambil peran dalam mendukung solusi damai atas konflik Palestina-Israel tersebut. Penulis menilai Peran APA, dengan jaringan diplomasinya, adalah penting untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel, meski hal itu tidak menyelesaikan konflik secara langsung.

Tulisan kelima dalam *Jurnal Politica* berjudul “*The Implementation of Socialist Republic of Vietnam’s Defense Policy in Encountering People’s Republic of China’s Strategic Position in the South China Sea Dispute*,” yang ditulis oleh Rahma Yustika Dewiand dan Anak Agung Banyu Perwita. Aktivitas yang telah dilakukan oleh China memicu tensi tinggi terutama dengan Vietnam sebagai salah satu penggugat terbesar di sengketa Laut China Selatan. China telah melakukan pengeboran minyak di laut yang bersengketa dengan Vietnam dan menyerang kapal eksplorasi minyak yang beroperasi di wilayah ZEE Vietnam sebagai bagian dari Laut China Selatan. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisa persoalan khusus dengan menggunakan teori realisme *defensive* dan kebijakan pertahanan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Vietnam mengimplementasikan kebijakan pertahanannya dalam menghadapi posisi strategis China di Laut China Selatan.

Demikian pengantar redaksi atas 5 (lima) tulisan yang dimuat dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Redaksi berharap semua tulisan ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat menjadi bahan informasi dan memberikan inspirasi serta alternatif solusi bagi pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan, dan tentunya juga memberikan manfaat yang besar bagi pembaca khususnya para peneliti, akademisi atau siapa saja yang tertarik dengan isi dalam *Jurnal Politica* ini. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli (Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dinna Wisnu, Ph.D (Dosen UNIKA Atma Jaya), Dr. Yandri Kurniawan (Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia) dan Panji Anugrah Permana, S.IP., M.Si (Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia) yang telah memberikan kontribusinya sebagai mitra bestari melalui koreksi dan masukannya terhadap tulisan-tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Mei 2017
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ikhsan Darmawan

Mengapa Kelompok “Tidak Setuju” Diperlakukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015?

Pilkada calon tunggal tahun 2015 terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam praktiknya, tidak semua pihak setuju dengan Pilkada calon tunggal tahun 2015. Di tiap daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, terdapat kelompok “tidak setuju” yang awalnya tidak setuju dengan putusan MK tentang Pilkada calon tunggal lalu mereka menyuarakan kesetaraan hak dan pengakuan untuk pilihan “tidak setuju”. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan calon atau kelompok “setuju”. Artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: Mengapa kelompok “tidak setuju” diperlakukan tidak setara dalam Pilkada calon tunggal di tahun 2015? Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari aturan pemilu dan hubungan antara demokrasi dan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam di ketiga daerah disertai pengumpulan data-data sekunder dari sumber internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab tidak diakomodirnya kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal di tahun 2015 adalah ketiadaan aturan yang dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang muncul terkait Pilkada calon tunggal. Sebagai reaksi dari hal itu, ketiga kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah melakukan usaha perlawanan dan protes kepada penyelenggara Pilkada. Simpulan penelitian ini yaitu fenomena tidak diberi ruang yang sama untuk kelompok “tidak setuju” dalam Pilkada calon tunggal disebabkan oleh aturan yang tidak menempatkan kelompok “tidak setuju” sebagai pihak yang sama dan setara dengan calon kepala daerah.

Kata kunci: calon tunggal, Pilkada, kelompok “tidak setuju”, diskriminasi, kesetaraan

Ikhsan Darmawan

Why Did the “Disagree” Group in Single Candidate Local Election 2015 Treated Unequally?

Single candidate local election 2015 was happened in three areas: Tasikmalaya Municipality, Blitar Municipality, and Timor Tengah Utara Municipality. In practice, not all people agree with Single Candidate Local Election 2015. In every area where it's local election contains of single candidate, there was group of “disagree” which do not agree with Constitutional Court Decision and then they sounded their rights and legitimacy for choice of “disagree”. Nevertheless, in fact, they got different responses with the candidate or “agree” group. This article tries to answer the question: Why did the “disagree” groups not treated equally in three single candidate local elections in 2015? Theoretical framework used in this research is the consequences of electoral laws and relation between democracy and election. This research uses the qualitative approach. Data was collected by using depth interview method in all three areas combined with secondary data from internet. The research result is that the cause of the “disagree” group did not treated equally in single candidate local election is the absence of regulation that can accommodate the problems arise related with single candidate election. As response to that, all three groups of “not agree” in three areas protested the local election bodies. The conclusion of this research is that the phenomenon of not giving space to the “disagree” groups in single candidate local election caused by the regulation that not place “disagree” group as the same and equal stakeholders with candidate in local election.

Keywords: single candidate; local election; “disagree” group, discrimination, equality

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan:
Studi Kasus Bank Sampah *Gardu Action*, Mancingan XI, Parangtritis, Bantul

Pertumbuhan pariwisata di Parangtritis telah berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Kenaikan tingkat pariwisata telah menyebabkan adanya masalah sampah dan tekanan sosial pada komunitas. Sistem politik intrakomunitas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendorong terbentuknya Bank Sampah. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif untuk melihat proses Bank Sampah sebagai elemen dari sistem politik intrakomunitas mengatur komunitas sosial di Mancingan XI. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan Bank Sampah sebagai elemen sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI memiliki peranan penting dalam melakukan manajemen konflik, mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi di aras lokal.

Kata kunci: Mancingan XI, Sampah, Sistem Politik Intrakomunitas, Bank Sampah

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Embodiment of The Community's Internal Political System and the Synergy of Environmental Management: Case Study of Waste Bank in Mancingan XI, Parangtritis, Bantul

The growth of tourism in the Parangtritis region has affected the life of the community. The increase in the rate of tourism has triggered the waste problem that causes social tensions between communities. The Internal political system of the community try to resolve the problem by presenting the waste bank. This research was conducted using qualitative to see the role of the waste bank as part of the internal political system of the community manages the social community in Mancingan XI. Data collection was done by field observations and in-depth interviews. Interviews were conducted with snowball sampling technique. The results showed a garbage bank as part of the internal political system of the community in Mancingan XI had them play an important role in conflict management, the implementation of community empowerment and democratization at the local level.

Keywords: Mancingan XI, waste, Intra-community Political System, waste bank.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Adirini Pujayanti

Gastrodiplomasi – Upaya Memperkuat Diplomasi Indonesia

Gastrodiplomasi merupakan diplomasi budaya yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan *brand awareness* bangsa. Gastrodiplomasi adalah instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan interaksi dan kerja sama internasional. Potensi budaya kuliner Indonesia dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Yogyakarta, Solo dan Semarang menunjukkan bahwa gastrodiplomasi Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci: gastrodiplomasi, diplomasi budaya, diplomasi publik, *soft power*, aktor non-negara.

Adirini Pujayanti

Gastrodiplomacy – Efforts to Strengthen Indonesia's Diplomacy

Gastrodiplomacy is cultural diplomacy that used food as a vehicle to increase brand awareness of the nation. It is an instrument for creating cross-cultural awareness in the hope to improving interaction and international cooperation. This paper demonstrates Indonesia culinary potential that can be employed as an instrument to strengthen Indonesia. The paper based on field research in Yogyakarta, Solo and Semarang argues that Indonesian gastro diplomacy has fully developed.

Keyword: gastrodiplomacy, cultural diplomacy, public diplomacy, soft power, non-states actor.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Simela Victor Muhamad

Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel

Solusi damai atas konflik Palestina-Israel yang belum berhasil dicapai perlu menjadi perhatian internasional, termasuk parlemen. *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, sebagai organisasi antar-parlemen negara-negara Asia, perlu mengambil peran dalam mendukung solusi damai atas konflik Palestina-Israel tersebut. Peran APA, sejalan dengan konsep *network diplomacy*, adalah memperkuat jejaring diplomasi di antara anggota parlemen negara-negara APA, dan juga dengan anggota parlemen lainnya di fora internasional, yang ditujukan untuk menjaga dan mengawal agar proses perdamaian Palestina-Israel dapat terus berlangsung dan perundingan perdamaian dapat dilanjutkan kembali. Peran APA tersebut dijalankan melalui aktivitas diplomasi di dalam lingkup sidang APA dan juga di luar sidang APA, khususnya forum antarparlemen. Peran APA, dengan jaringan diplomasinya, adalah penting untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel, meski hal itu tidak menyelesaikan konflik secara langsung. Tulisan ini membahas peran APA tersebut.

Kata kunci: Asian Parliamentary Assembly, APA, perdamaian, Palestina, Israel, diplomasi parlemen

Simela Victor Muhamad

The Role of the Asian Parliamentary Assembly in Supporting Palestinian-Israeli Peace

A peaceful solution to the Palestinian-Israeli conflict that has not yet been reached should be of international concern, including parliament. Asian Parliamentary Assembly (APA), as the inter-parliamentary organization of Asian countries, needs to take a role in supporting a peaceful solution to the Palestinian-Israeli conflict. APA's role, in line with the concept of network diplomacy, is to strengthen diplomacy networks among MPs of APA countries, as well as with other MPs in international fora, aimed at safeguarding the Palestinian-Israeli peace process should be in progress and peace talks can be resumed. APA's role was run through diplomatic activity in scope of the APA meetings and beyond APA forum, particularly in the inter-parliamentary forum. APA's role, with its diplomatic network, is important to support the Palestinian-Israeli peace process, although it does not directly resolve the conflict. This paper discusses the role of APA.

Keywords: Asian Parliamentary Assembly, APA, peace, Palestine, Israel, parliamentary diplomacy

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Anak Agung Banyu Perwita and Rahma Yustika Dewi

The Implementation of Socialist Republic of Vietnam's Defense Policy in Encountering People's Republic of China's Strategic Position in the South China Sea Dispute

China's strategic position in the South China Sea dispute has created lots of controversy, particularly with the claimants. The activities done by China have triggered heightened tensions especially with Vietnam as one of the biggest claimants in the disputed sea. China did oil drilling in the disputed water with Vietnam and attacked oil exploration vessel which operates in the Vietnamese ZEE as a part of the South China Sea water. Those examples of Beijing actions have made Hanoi worries upon their claims in the South China Sea. In 2009 Vietnam released Defense White Paper which contained the defense policy of Vietnam as well as Vietnam's concerns upon the South China Sea dispute. Vietnam has implemented its defense policy in the field of economy, military, politics, and technology. The implementation of Vietnam defense policy is a part of Vietnam's action in encountering China's strategic position in the disputed waterways. In general, this writing aimed to analyze the particular issues by using the theories of defensive realism and defense policy to answer the research question on how Vietnam implemented its defense policy in encountering China's strategic position in the South China Sea dispute.

Keywords: defense policy, Vietnam, South China Sea dispute, China.

Anak Agung Banyu Perwita dan Rahma Yustika Dewi

Implementasi Kebijakan Pertahanan Republik Sosialis Vietnam Dalam Menghadapi Posisi Strategis Republik Rakyat China Di Sengketa Laut China Selatan

Posisi strategis China dalam Laut China Selatan telah mengundang banyak kontroversi, terutama dengan negara penuntut. Aktivitas yang telah dilakukan oleh China memicu tensi tinggi terutama dengan Vietnam sebagai salah satu penggugat terbesar di sengketa Laut China Selatan. China telah melakukan pengeboran minyak di laut yang bersengketa dengan Vietnam dan menyerang kapal eksplorasi minyak yang beroperasi di wilayah EEZ Vietnam sebagai bagian dari Laut China Selatan. Contoh aksi Beijing tersebut telah membuat Hanoi khawatir atas gugatan mereka di Laut China Selatan. Pada tahun 2009, Vietnam mengeluarkan Buku Putih Pertahanan berisi kebijakan pertahanan Vietnam serta kepedulian Vietnam dalam sengketa Laut China Selatan. Vietnam telah menerapkan kebijakan pertahanan di bidang ekonomi, militer, politik, dan teknologi. Implementasi kebijakan pertahanan Vietnam adalah bagian dari tindakan Vietnam dalam menghadapi posisi strategis China di perairan yang disengketakan. Secara general, tulisan ini bermaksud untuk menganalisa persoalan khusus dengan menggunakan teori realisme defensive dan kebijakan pertahanan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Vietnam mengimplementasikan kebijakan pertahanannya dalam menghadapi posisi strategis China di Laut China Selatan.

Kata kunci: Kebijakan Pertahanan, Vietnam, Sengketa Laut China Selatan, China.